



OPTIMALISASI KELENGKAPAN DAN PEREKAMAN DATA KEPENDUDUKAN BAGI SISWA PONDOK PESANTREN BENTANG BAITURROHIM KECAMATAN MANDALAJATI KOTA BANDUNG

Ika Erawati¹, Yan Raspati², Wahyu Hario Satriyotomo³, Mujahid Siroth Rasyid Jauhari⁴, Sunandie Eko Ginanjar⁵

^{1,2,3,4,5}Ilmu Administrasi Publik/Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bagasasi Bandung

E-mail: ikaerawatisukandar2020@gmail.com

Article History:

Received: 11-01-2023

Revised: 15-01-2023

Accepted: 21-02-2023

Keywords:

kependudukan, administrasi, pelayanan, publik, siswa, pesantren

Abstract: Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan pada tanggal 27 Januari 2023 di pondok pesantren Eco Bentara Baiturrohim Pasir Impun Kota Bandung. Tujuan pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat untuk memfasilitasi peserta didik di pondok pesantren baiturrohim dan warga dilingkungan untuk melengkapi administrasi kependudukan dengan pembuatan akte kelahiran, kartu identitas anak, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kematian. Pelaksanaan kegiatan berupa sosialisasi pemahaman tentang pentingnya administrasi kependudukan, fungsi dan manfaat kartu identitas, prosedur kelengkapan identitas dan perekaman dan pencetakan identitas. Peserta sosialisasi terdiri dari forum RW dan RT, Warga Kelurahan Pasir Impun dan Siswa Pondok pesantren Bentara Baiturrohim. Metode yang digunakan pada sosialisasi yaitu metode ceramah dan diskusi. Sebelum memulai kegiatan, membagikan terlebih dahulu pretest untuk mengetahui kemampuan awal peserta dan diakhir kegiatan dibagikan untuk posttest pemahaman setelah menerima materi.

PENDAHULUAN

Data kependudukan bagi masyarakat sebagai bentuk identitas diri individu untuk pencatatan sipil. Pencatatan sipil bagian proses administrasi, administrasi merupakan proses kegiatan penyusunan dan pencatatan data informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungan satu sama lain (Herliana. 2016). Proses data kependudukan tercatat secara keseluruhan mulai dari tingkat terendah Desa atau Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten sampai dengan provinsi. Perkembangan system pencatatan sipil mulai dari pencatatan manual sampai dengan digital sudah melalui transformasi yang begitu Panjang tahapannya. Inovasi dan perkembangan teknologi memudahkan masyarakat untuk melengkapi catatan kependudukan.



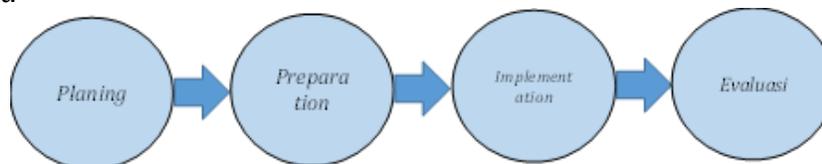
Administrasi kependudukan mencatat rangkaian kegiatan pencatatan yang dapat digunakan pada Pelayanan public. Penyelenggara Pelayanan publik adalah pemerintah provinsi, kabupaten atau kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, Pencatatan data sipil diperlukan bagi masyarakat Indonesia mulai sejak dari masa kelahiran sampai dengan pencatatan kematian. Pencatatan sipil terintegrasi secara nasional, untuk terselenggaranya pencatatan sipil adanya kordinasi, pemberian pelatihan, pembimbingan kepada petugas pelaksana pencatatan sipil.

Setiap warga negara Indonesia pasca kelahiran anak wajib melaporkan kepada instansi pelaksana untuk proses pencatatan data kependudukan. Pemerintah memberikan kemudahan pada masyarakat dengan pemanfaat teknologi untuk memberikan Pelayanan yang lebih optimal. Optimalisasi Pelayanan dalam proses pencatatan data kependudukan dengan menggunakan system Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dapat diakses melalui jaringan internet. SIAK merupakan system informasi berbasis web dengan output yang dihasilkan agar tertib administrasi kependudukan. Nur Baharuddin (2019) menjelaskan hasil penelitian, untuk implementasi SIAK diperlukan dukungan finansial, kelengkapan alat serta kemampuan pengoperasian aplikasi.

System informasi administrasi kependudukan sebagai bentuk pencatatan administrasi mulai dari pembuatan akta kelahiran, kartu Identitas Anak, Kartu tanda penduduk, kartu keluarga, kartu keluarga, keterangan pindah, surat domisili dan catatan kependudukan lainnya yang tertuang dalam peraturan presiden Nomor 96 tahun 2018. Persepsi masyarakat masih belum memahami fungsi dan manfaat kelengkapan data kependudukan. Kepemilikan kartu identitas sebagai bentuk kejelasan hak sipil untuk memberikan perlindungan hukum serta memperoleh hak dan kewajiban warga negeri (Firnandan dan Prabawati, 2020). Tujuan tim PKM Dosen STIA Bagasasi untuk memfasilitasi peserta didik yang ada di pondok pesantren Bentara Baiturrohimi dan warga dilingkungan sekitar pondok untuk melengkapi identitas sebagai warga negara.

METODE

Optimalisasi administrasi kependudukan dengan memberikan Pelayanan langsung kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan berupa pembuatan KIA, Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga. Metode pelaksanaan pada Pengabdian masyarakat berupa sosialisasi dan Pelayanan secara langsung. pelayanan langsung diberikan dengan membawa kendaraan dari Disdukcapil kota Bandung yaitu MEPELING. Alur pelaksanaan dijelaskan pada gambar sebagai berikut.



Gambar 1. Metode pelaksanaan PKM

Metode kegiatan pelaksanaan PKM menggunakan metode ceramah, diskusi dan pelaksanaan perekaman data. Metode ceramah untuk menjelaskan materi yang disampaikan, diskusi dilakukan untuk menanyakan kelengkapan berbagai data yang dijadikan persyaratan. Perekaman data diproses setelah warga diberikan pengarahan serta mempersiapkan dokumen.



HASIL

Perencanaan awal kegiatan dilakukan survey lokasi untuk menentukan dan menyesuaikan dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Diskusi awal dengan tim menentukan kegiatan berupa kelengkapan data administrasi. Dilanjutkan dengan persiapan kebutuhan yang diperlukan saat kegiatan berlangsung. Proses persiapan merumuskan proposal kegiatan dan menentukan tanggal kegiatan, mempersiapkan perijinan ke berbagai Instansi terkait kegiatan, membuat materi, mempersiapkan sarana dan prasarana seperti proyektor, laptop, spidol, papan tulis, spanduk, poster.



Gambar 1. Diskusi perencanaan

Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2023 di Yayasan Bentang sastra Bumantara kelurahan Pasir Impun Mandalajati Kota Bandung. Peserta kegiatan berjumlah 86 orang, daftar peserta yang menghadiri dari forum Rukun Warga dan Rukun Tetangga serta siswa pondok pesantren Bentara Baiturrohim untuk memperoleh Pelayanan perekaman data kependudukan. Perekaman data yang dilakukan meliputi pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA), Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Pemamparan materi diberikan untuk menyamakan persepsi peserta terlebih dahulu. Pada pemaparan mengarahkan forum RW dan RT untuk lebih memberikan edukasi kepada warga untuk melengkapi segala keperluan administrasi tentang kependudukan. Dijelaskan susunan kegiatan sebagai berikut.

No.	Judul Sesi	Aktivitas
1	Pembukaan Sosialisasi	Sambutan
2	<i>pretest</i>	Peningkatan pemahaman awal
3	Pentingnya administrasi kependudukan	Disampaikan untuk menyamakan persepsi tentang peraturan kelengkapan administrasi
4	Prosedur kelengkapan data	Menerangkan syarat dan alur yang dibutuhkan untuk kelengkapan pembuatan data kependudukan.
5	<i>Posttest</i>	Pemahaman setelah menerima materi
6	Perekaman data	Mempersiapkan dokumen Perekaman dan Pembuatan langsung data kependudukan
7	Penutupan	Penutupan kegiatan

Tabel 1. Susunan kegiatan



Pemaparan materi disampaikan sesuai dengan waktu kegiatan yang sudah ditentukan. Metode dalam penyampaian materi menggunakan metode ceramah dan *forum group diskusi*. Peserta diberikan kesempatan untuk menanyakan berbagai proses kelengkapan data administrasi kependudukan.



Gambar 2. Penyampaian Materi



Gambar 3. Penjelasan pengisian *pretest posttest*

Pemaparan materi tersampaikan dilanjutkan diskusi dengan forum RW dan RT untuk mengarahkan masyarakat dalam perekaman data kependudukan. Perekaman data kependudukan yaitu mempersiapkan dokumen yang dijadikan persyaratan dalam pembuatan Akta kelahiran, KIA, KTP dan KK.

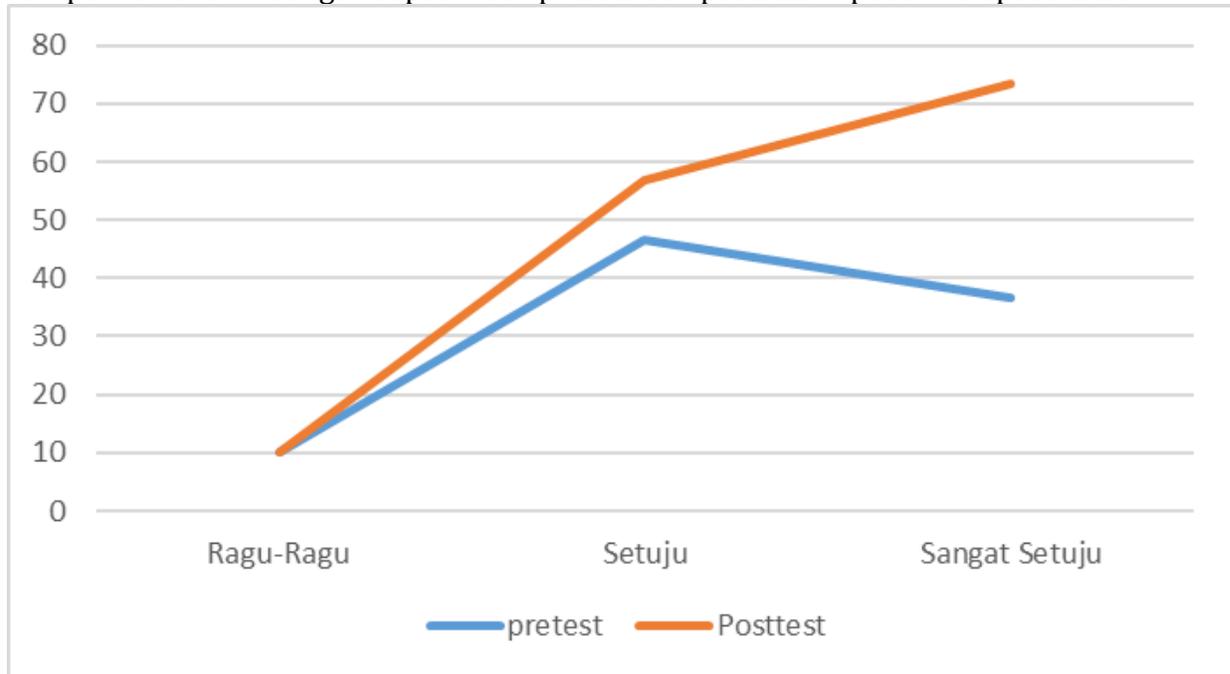


Gambar 4. Chek Kelengkapan Dokumen Persyaratan dan perekaman data



DISKUSI

Pemahaman peserta terhadap administrasi kependudukan begitu diperlukan masih perlu distimulus agar mereka dapat mempersiapkan untuk kelengkapan penunjang Pendidikan dikemudian hari. Pretest dan posttest yang diberikan kepada siswa pesantren menunjukkan ada penambahan dalam pemahaman. Pengetahuan tentang undang-undang kelengkapan data administrasi masih sangat minim sekali, tetapi dalam pemahaman alur mampu memahami dengan cepat. Hasil pretest dan posttest dapat dilihat pada tabel 2.



Tabel 2. Diagram pretest dan posttest

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat perlunya pemahaman kelengkapan data administrasi kependudukan perlu dijelaskan kepada peserta didik agar lebih memahami untuk prosedur pembuatan. Antusias masyarakat untuk pencetakan data administrasi kependudukan begitu bersemangat, persepsi masyarakat terhadap system informasi administrasi kependudukan dianggap sulit karena kurang sosialisasi tentang penggunaan aplikasis berbasis web. Minimnya wawasan memberikan persepsi kurang peduli tentang penting kelengkapan data administrasi.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat diberikan dukungan oleh STIA Bagasasi, Yayasan Bentang Sastra Bumantara Bandung, Disdukcapil kota Bandung, Pegawai Kecamatan Mandalajati dan Pegawai Kelurahan Pasir Impun. Tim PKM Dosen STIA Bagasasi mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah mendukung atas terselenggaranya kegiatan dan terimakasih untuk LPPM STIA Bagasasi yang sudah membantu dan memfasilitasi PKM sehingga dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

**DAFTAR REFERENSI**

- [1] Firnanda, M. R. H. E., & Prabawati, I. (2020). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 8(5).
- [2] Herliana, A. (2016). Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Administrasi Data Pribadi Dan Nilai Mahasiswa Di Perguruan Tinggi (Studi Kasus Universitas Kebangsaan Bandung). *Jurnal Informatika*, 1(2), 82–92. <https://doi.org/10.31311/ji.v1i2.41>
- [3] Nur, Baharuddin. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palopo. *Journal I La Galigo: Public Administration Journal*, 2(1), 38-44. 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.35914/ilagaligo.193>
- [4] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan
- [5] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil